

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Penegakan Hukum HAM di Indonesia	17
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	23
B. Landasan Teori.....	27
1. Keadilan Transisi (<i>Transitional Justice</i>)	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Bahan Penelitian.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Jalannya Penelitian.....	33
E. Analisis Hasil Penelitian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor-Faktor Penegakan Hukum HAM di Indonesia oleh Lembaga Negara	38
A.1. Performa Presiden	39
1) Performa Presiden Soeharto (1967-1998).....	40
2) Performa Presiden B.J. Habibie (Periode 1998–1999)	43
3) Performa Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001).....	46
4) Performa Presiden Megawati Soekarnopoetri (2001–2004)	48
5) Performa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)	50
6) Performa Presiden Joko Widodo (2014–2024)	52
7) Presiden Prabowo Subianto (2024–Sekarang)	53
A.2. Performa DPR	60
A.3. Performa Jaksa Agung.....	67
B. Prospek Penegakan Hukum HAM di Indonesia berdasarkan Perspektif Komnas HAM.	70
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tugas dan Wewenang Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39
Tabel 4.2. Peraturan Perundang-undangan oleh Presiden Habibie.	44
Tabel 4.3. Potensi Presiden Habibie.....	45
Tabel 4.4. Peraturan Perundang-undangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.....	46
Tabel 4.5. Potensi Presiden Abdurrahman Wahid.	47
Tabel 4.6. Peraturan Perundang-undangan oleh Presiden Megawati.	48
Tabel 4.7. Potensi Presiden Megawati	49
Tabel 4.8. Peraturan Perundang-undangan oleh Presiden SBY	50
Tabel 4.9. Potensi Presiden SBY.....	51
Tabel 4.10. Peraturan Perundang-undangan oleh Presiden Jokowi.	52
Tabel 4.11. Potensi Presiden Prabowo	54
Tabel 4.12. Tabel Analisis Performa Presiden dalam Penanganan Kasus PHB.	55
Tabel 4.13. Tugas dan Wewenang DPR	60
Tabel 4.14. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung.....	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Grafik Alokasi Anggaran untuk Komnas HAM 2014–2025	63
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	97
Lampiran 2	98
Lampiran 3	99